

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

(Salipadang, Jao & Beauty, 2017) Pada penelitian nya pengumpulan data menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi logistic dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Komisaris independen dan Komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return* saham. Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

(Budiyanto & Aditya, 2015) Jenis penelitian ini adalah penelitian Kasual Komparatif yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Data dianalisis menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara variabel *debt to equity*, profitabilitas, struktur kepemilikan, dan kualitas audit berpengaruh positif tidak signifikan serta Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

(Putra & Ramantha, 2015) Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa profitabilitas, umur perusahaan, berpengaruh negatif signifikan dan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan

publikasi laporan keuangan tahunan. Sedangkan, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan tahunan.

(Rahma, Lusiana & Indriani, 2019) Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Logistik. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Struktur Modal berpengaruh negatif tidak signifikan dan *Profitabilitas* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

(Dwiyani, Badera & Sudana, 2017) Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dan uji *independent sample t-test*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa komite audit, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan serta Dewan komisaris dan *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan reaksi pasar atas penyajian laporan keuangan yang tepat waktu maupun yang tidak tepat waktu.

(Daoud, Ismail & Lode, 2015) melakukan penelitian dengan judul *The Impact of Internal Corporate Governance on The Timeliness of Financial Reports of Jordanians Firms: Evidence using Audit and Management Reports Lags*. Ketepatan waktu laporan keuangan diukur dengan *Audit Report Lag* (ARL) dan *Management Report Lag* (MRL). Hasil model ARL menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota dewan yang independen dari manajemen memerlukan waktu yang jauh lebih singkat untuk menyiapkan dan menerbitkan laporan keuangan mereka. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah dewan direksi lebih besar terkait dengan keterlambatan laporan audit yang lebih tinggi. Hasil juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memisahkan peran CEO dan ketua adalah lebih cepat dalam menerbitkan laporan keuangan dari pada

perusahaan yang menggabungkan peran CEO dan ketua. Selain itu, dewan direktur yang lebih banyak rapat membuat laporan audit lebih singkat. Temuan itu juga mendukung bahwa keberadaan seorang komite audit dapat menyelesaikan asimetri informasi antara manajemen dan auditor eksternal untuk mengurangi keterlambatan laporan audit dan keterlambatan laporan manajemen. Namun, hasil model MRL menunjukkan bahwa keterlambatan laporan manajemen berhubungan positif dengan ukuran dewan besar dan ketekunan dewan dan berpengaruh negatif terhadap keberadaan komite audit.

(Shafiy & Kamalluarifin, 2015) melakukan penelitian dengan judul *The Influence of Corporate Governance and Firm Characteristics on The Timeliness of Corporate Internet Reporting By Top 95 Companies in Malaysia*. TCIR di dasarkan pada snapshot situs web menggunakan daftar periksa yang diadopsi dari abdel salam dan el-masry (2008). Hasil mengungkapkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara dewan independensi dan TCIR tetapi juga mengungkapkan hubungan positif antara usia direktur, profitabilitas dan *leverage*. Hubungan positif menunjukkan direksi yang lebih berpengalaman, profitabilitas tinggi dan *leverage* perusahaan dapat memberikan pelaporan internet perusahaan yang tepat waktu kepada pengguna. Namun, hasilnya juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara layanan direktur dan ukuran perusahaan dengan TCIR.

(Puasa, Salleh & Ahmad, 2014) melakukan penelitian dengan judul *Audit Committee and Timeliness of Financial Reporting: Malaysian Public Listed Companies*. Pada penelitian ini melihat dan membandingkan ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk periode pra dan pasca MCGG 2007. Hasil nya menunjukkan bahwa tingkat dan aktivitas independen komite audit secara signifikan terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan untuk periode sebelum MCGG 2007. Sebaliknya, hasil untuk periode setelah MCGG 2007 hanya menunjukkan komposisi direktur, ukuran dan keahlian keuangan semata-mata non-eksekutif yang terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nilai rata-rata ketepatan waktu setelah MCGG 2007 melaporkan peningkatan signifikan yang menunjukkan keefektifan dan efisiensi komite audit menuju peningkatan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Suatu hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih individu, yang disebut pelaku (*Principals*), memperkerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut agent, untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agent (Putri *et al*, 2015).

Teori agensi merupakan teori yang berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan mengenai keagenan biasanya timbul saat konflik terjadi akibat tujuan dan keinginan dari pemilik maupun manajer dan terdapat kesulitan atau mahal biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi dan memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer. Teori ini membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang akan muncul antara prinsipal dan agen. Komite audit diharapkan dapat mengawasi kinerja manajemen, sehingga manajemen mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan (Widyaswari, Ratna & Suardana, 2014)

2.2.2. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

Ketepatanwaktuan sangat berkaitan dengan teori kepatuhan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatanwaktuan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan *go public* di Indonesia yang telah diatur oleh Bapepam-LK pada Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala

Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit laporan keuangan, harus disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan.. Dengan adanya regulasi ini, seharusnya perusahaan *go public* menyampaikan laporan keuangan tahunannya tepat waktu. Sehingga kondisi di atas sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

2.2.3. Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 (Revisi 2017) Paragraf 09 “ Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: (a) asset, (b) liabilitas, (c) ekuitas, (d) penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, (e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan (f) arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

Laporan keuangan adalah sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Keandalan suatu laporan keuangan dapat dilihat apabila memiliki unsur-unsur relevansi dan reliabilitas. Relevansi sebuah laporan keuangan akan terlihat jelas apabila pihak internal perusahaan mampu menyajikan informasi yang sesuai. Ada tiga kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas

laporan keuangan yaitu ketepatan waktu, kehandalan dan komparatif (Putra & Ramantha,2015).

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2017:1.10) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan pengertian diatas sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu.

Dari hal yang dilaporkan tersebut dapat dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi yang sedang dialami oleh perusahaan saat ini. Kemudian laporan keuangan juga dapat menjadi penentu langkah apa yang akan cocok diambil oleh perusahaan untuk kondisi sekarang dan masa depan. Dengan meninjau dari persoalan-persoalan yang ada, baik itu kelemahan perusahaan ataupun kelebihan perusahaan.

Menurut Kasmir (2014:10-11) secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memeriksa informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Memberikan informasi tentang informasi lainnya.

2.2.4. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial Negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statemen keuangan. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, dengan kata lain informasi juga harus mempunyai nilai. Beberapa kriteria yang menjadikan informasi dapat mempunyai nilai atau manfaat yaitu:

Karakter Kualitatif Informasi Keuangan yang berguna

(SAK, 2017:13) Bab 3 menyatakan agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding, terverifikasi, tepat waktu dan terpaham.

a. Karakteristik Kualitatif Fundamental

1. Relevan

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmator atau keduanya.

2. Materialitas

Informasi adalah material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

3. Representasi Tepat

Laporan keuangan mempresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral dan bebas dari kesalahan.

b. Karakteristik Kualitatif Peningkat

1. Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam dan perbedaan antara, pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya. Keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos.

2. Keterverifikasi

Keterverifikasi membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya.

3. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembuat keputusan.

4. Keterpahaman

Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomik serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun.

Menurut PSAK No.1 (Revisi 2017) Paragraf 10, Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode.
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain selama periode.
3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraph 38 dan 38A.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A-40I.

Pada PSAK No. 1 (Revisi 2017) Paragraf 10A menyatakan entitas dapat menyajikan suatu laporan keuangan tunggal untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Bagian tersebut disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan laba rugi tersendiri. Jika demikian, laporan laba rugi tersendiri tersebut akan

langsung mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif, yang dimulai dengan laba atau rugi.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 (Revisi 2017) Paragraf 9 adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini, investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Berikut para pengguna laporan keuangan serta kepentingannya terhadap laporan keuangan adalah:

1. Investor

Para investor memanfaatkan laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi. Selain itu juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

2. Karyawan

Laporan keuangan memungkinkan karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pension dan kesempatan kerja.

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman memerlukan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan Kreditor Lain

Untuk mengetahui apakah jumlah yang terutang dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

5. Pelanggan

Berkepentingan mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila antara perusahaan dan pelanggan terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

6. Pemerintah

Pemerintah memerlukan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Menyediakan informasi agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kemakmuran perusahaan serta serangkaian aktivitasnya. Selain itu juga perusahaan membantu memberikan kontribusi pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.

2.2.5. Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Salah satu aspek pendukung dari keberpautan atau relevansi adalah ketepatanwaktuan. Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Suwardjono, 2017:170).

Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Secara konseptual ketepatanwaktuan adalah ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan (Putra & Ramantha, 2015).

Peraturan mengenai waktu pelaporan keuangan di Indonesia diatur pada oleh Bapepam-LK pada Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai saat ini belum mempengaruhi peraturan yang berlaku sebelumnya, sehingga peraturan yang digunakan masih menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Pada peraturan tersebut yang dimaksud adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit laporan keuangan, harus disampaikan kepada Bapepam-LK (OJK) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan. Kewajiban tentang pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut menyebutkan semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam-LK (OJK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bapepam-LK. Bagi perusahaan yang melanggar

aturan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa teguran tertulis, denda hingga penghentian sementara dari bursa.

2.2.6. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi dan Tim Manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Perseroan public membentuk Komite Audit sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5. selain itu, pembentukan Komite Audit sesuai dengan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 jo No. Kep-643/BL/2012 tentang Komite Audit dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 (IAI, 2015:144).

a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas pokok dari Komite Audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IAI, 2015:145).

Menurut lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 halaman 3, tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik:

1. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau perusahaan Publik.

b) Kualifikasi Komite Audit

Menurut lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 halaman 2, persyaratan sebagai Komite Audit adalah:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan public, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan public, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang member jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Komite Audit merupakan komite bentukan komisaris yang tanggung jawabnya kepada dewan komisaris. Komite Audit juga membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses mengolah informasi keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Putra, Pramana & Ramantha, 2015).

Komite Audit mempunyai peran sebagai komite independen dalam perusahaan yang memiliki fungsi utama dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*, serta mengurangi keterlambatan pelaporan keuangan. Komite Audit yang efektif diharapkan untuk focus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham dan mencegah

memaksimalkan kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Purbasari, Mirani & Rahardja, 2014).

2.2.7. *Leverage*

Leverage keuangan merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. *Leverage* memperbesar keberhasilan (laba) dan kegagalan (rugi) manajerial. Utang yang terlalu besar menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar kesempatan yang menguntungkan. Kreditor lebih menyukai peningkatan modal ekuitas sebagai pelindung atas kerugian pada saat-saat sulit. Menurunkan modal ekuitas sebagai proporsi pendanaan perusahaan akan menurunkan perlindungan kreditor terhadap kerugian sehingga meningkatkan risiko kredit. *Leverage* keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* keuangan disebut memperdagangkan ekuitas.

Dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan:

1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil dari pada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas.
2. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak (Subramanyam & Wild, 2010:265).

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam pembiayaan aktiva perusahaan. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman dari luar untuk membiayai aktivitya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri. Semakin tinggi *leverage* berarti semakin tinggi resiko nya karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melunasi kewajiban hutang nya baik dalam bentuk pokok ataupun bunganya. Tingginya rasio *financial leverage* mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Resiko keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan merupakan berita buruk yang akan

mempengaruhi kondisi perusahaan dimata masyarakat (irfan Haris Setiawan,2014).

Leverage atau rasio hutang yang biasa dikenal dengan rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Sebaiknya komposisi modal harus lebih besar dari hutang (Nurmiati,2016).

Pada rasio *leverage* yang disebut sebagai DER (*debt to equity*) semakin tingginya rasio *leverage* perusahaan maka semakin besar pula risiko keuangan yang ada pada perusahaan tersebut yang memungkinkan perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban pokok maupun bunganya.

Adapun rumus *debt to equity* (DER) :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki *debt to equity ratio* yang tinggi mungkin tidak dapat menarik tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain.

2.2.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total nilai asset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Perusahaan besar cenderung ingin menyegarkan penyampaian dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini didasarkan dari beberapa alasan yaitu:

1. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, perusahaan besar sudah memiliki sistem yang lebih maju dan sistem pengendalian intern yang kuat.

2. Perusahaan besar mendapatkan pengawasan lebih dari investor dan regulator.
3. Perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik.
(Lathiefatunnisa,2015).

Perusahaan besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, ini dikarenakan pelaporan keuangan secara tepat waktu dapat menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai item – item tersebut maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Irfan Haris Setiawan,2014).

Ukuran perusahaan dapat di nilai dari total nilai aktiva, total penjualan, jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan adalah salah satu tolak ukur yang menunjukkan total asset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *log total asset*.

$$\text{Size} = \text{Log Natural Total Asset}$$

Terdapat tiga alternative yang digunakan untuk menghitung *size* perusahaan, yaitu total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan asset yang besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal. Dengan adanya kemudahan mengakses pasar modal, perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana. Ukuran perusahaan besar cenderung membagikan dividen untuk menghindari konflik keagenan antara pihak manajer dan pemilik. Perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan Karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Oktavia &

Suryaningrum, 2018). Dengan demikian semakin besarnya ukuran perusahaan maka semakin baik nya internal kontrol yang dimiliki perusahaan dan memiliki sumber daya yang lebih banyak sehingga mendukung untuk lebih mudah nya proses berjalannya kegiatan yang ada pada perusahaan.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan antar komite audit dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Komite audit dibentuk untuk bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Berkaitan dengan laporan keuangan, komite audit berperan dan bertanggung jawab memonitoring dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijakan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa laporan keuangan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit (Salipadang, Jao & Beauty, 2017). Komite audit setidaknya memiliki satu orang anggota yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan atau akuntansi (Widyaswari & Suardana, 2014). Dengan ada nya komite audit pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan akan semakin ketat sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku sehingga perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan nya dengan tepat waktu.

2.3.2. Hubungan antar *Leverage* dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan bergantung kepada kreditor dalam membiayai asset perusahaan nya. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi lebih banyak membiayai asset nya dengan pinjaman. Sedangkan, perusahaan dengan *leverage* rendah lebih banyak membiayai asset nya dengan modal sendiri (Dwiyani, Badera & Sudana, 2017). Dengan demikian, semakin tingginya rasio *leverage* berarti semakin tingginya risiko kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya baik berupa pokok maupun bunganya. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi juga

dapat mengakibatkan perusahaan melakukan *window dressing* sehingga berpotensi untuk menyampaikan laporan keuangan nya tidak tepat waktu.

2.3.3. Hubungan antar Ukuran Perusahaan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung untuk menyajikan laporan keuangannya lebih tepat waktu dari pada perusahaan yang kecil (Budiyanto & Aditya, 2015). Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang memadai dalam pengumpulan data yang berguna dalam penyusunan laporan keuangan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Hubungan antar komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Komite audit membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses mengolah informasi keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Keefektifan komite audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran komite audit, karena sumber daya yang mereka miliki akan cukup memadai untuk menyelesaikan masalah. Semakin banyaknya anggota komite audit dan semakin banyak pertemuan akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan (Putra & Ramantha, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyani, Badera & Sudana, 2017) menyatakan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H1 = Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.4.2. Hubungan antar *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal dan asset. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi. Perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi mempunyai kebiasaan untuk melakukan *window dressing* sehingga berpotensi untuk melaporkan laporan keuangan tidak tepat waktu (Budiyanto & Aditya, 2015). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan nya dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan juga merupakan berita buruk sehingga perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan auditor untuk memulai proses pengauditan lebih lambat dari biasanya (Dwiyani, Badera & Sudana, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyani, Badera & Sudana, 2017) menyatakan bahwa ada pengaruh negatif tidak signifikan antara *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H2 = *Leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.4.3. Hubungan antar ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari nilai buku aktiva (Rahma, Lusiana & Indriani 2019). Perusahaan dengan aset yang besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal. Dengan adanya kemudahan mengakses pasar modal, perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana. Ukuran perusahaan yang besar cenderung membagikan dividen untuk menghindari konflik keagenan antara pihak manajer dan pemilik. Perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan

profitabilitas perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Oktavia & Suryaningrum, 2018). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, Lusiana & Indriani, 2019) menyatakan bahwa ada pengaruh negatif signifikan antara ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H3 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.4.4. Hubungan antara Komite Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan penjelasan hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat diatas, dapat diambil kesimpulan hipotesis untuk hubungan Komite Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara simultan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Dimana hubungan antara Komite Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara simultan akan terdapat pengaruh signifikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

H4 = Komite Audit, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Sering kali perusahaan lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya. Karena sering kalinya perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan bahkan telah menjadi kebiasaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mengandung *good news* dan *bad news* bagi para investor. Kurang nya kesadaran dari perusahaan serta kelalaian yang sering terjadi pada keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan ini sangatlah berpengaruh untuk pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan seperti investor, entah itu keputusan untuk kondisi saat ini maupun untuk masa depan. Keterlambatan dari menyampaikan laporan keuangan dapat mengurangi ke relevan informasi yang ada pada laporan keuangan sehingga dapat

menimbulkan kerugian yang sangat berpengaruh bagi perusahaan karena investor akan menimbulkan reaksi negatif kepada perusahaan untuk tidak menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Semua perusahaan harus bisa memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan keuangan dan membuat pengendalian yang cukup terutama pada perusahaan sub sektor *property and Real Estate* yang sedang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam perkembangan ekonomi saat ini. Agar tidak terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yaitu: Komite Audit, *Leverage* (DER) dan Ukuran Perusahaan.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

